

Nilai-Nilai Pilar Pancasila Sebagai Komitmen Kebangsaan

Sasmitro Anggoro¹, Meyniar Albina²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 17, 2024

Revised December 19, 2024

Accepted December 29, 2024

Available online 25 January, 2025

Keywords:

Pancasila, Nilai-Nilai, Komitmen Kebangsaan

Keywords:

Pancasila, Values, National Commitment



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima pilar Pancasila Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun komitmen kebangsaan. Pilar pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan pentingnya spiritualitas dan toleransi antarumat beragama. Pilar kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat individu. Pilar ketiga, Persatuan Indonesia, mendorong semangat nasionalisme yang inklusif di tengah pluralitas budaya, suku, dan agama. Pilar keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memperkuat nilai-nilai demokrasi berbasis musyawarah untuk mufakat. Pilar kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Implementasi nilai-nilai ini tidak hanya menjadi landasan etika bagi individu, tetapi juga sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan publik. Komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi kebangsaan menjadi benteng melawan ancaman disintegrasi bangsa dan tantangan globalisasi. Dengan demikian, penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi tugas kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini merekomendasikan pengintegrasian pendidikan nilai-nilai Pancasila di berbagai segi, baik formal maupun informal, guna memperkuat komitmen kebangsaan di tengah tantangan zaman.

ABSTRACT

Pancasila, as the foundation of the state and the way of life of the Indonesian nation, plays a central role in maintaining unity and cohesion amidst diversity. The values contained within the five pillars of Pancasila Belief in the One and Only God, Humanity, Unity, Democracy, and Justice serve as a strong foundation for building national commitment. The first pillar, Belief in the One and Only God, emphasizes the importance of spirituality and tolerance among religious communities. The second pillar, Just and Civilized Humanity, highlights respect for human rights and individual dignity. The third pillar, the Unity of Indonesia, promotes an inclusive nationalism amidst cultural, ethnic, and religious diversity. The fourth pillar, Democracy Guided by the Inner Wisdom of Deliberations among Representatives, strengthens democratic values rooted in deliberation and consensus. The fifth pillar, Social Justice for All Indonesian People, underscores the importance of equity and justice in various aspects of community life. The implementation of these values not only serves as an ethical foundation for individuals but also as a guideline for public policymaking. Commitment to Pancasila as the nation's ideology acts as a bulwark against the threats of national disintegration and the challenges of globalization. Therefore, strengthening the understanding and application of Pancasila's values becomes a collective responsibility of all elements of society to safeguard the unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This study recommends integrating Pancasila values education across various sectors, both formal and informal, to reinforce national commitment amidst the challenges of the times.

PENDAHULUAN

Komitmen kebangsaan yang menjadi indikator pertama dalam pilar kebangsaan bukanlah tanpa alasan dengan parameter ini pemerintah dapat melihat sejauh mana pemikiran masyarakat terhadap moderasi beragama dan bagaimana pengamalan ajaran agama dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif moderasi beragama bahwa mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Dengan komitmen

*Corresponding Author

Email: sasmitroanggoro33@gmail.com, meyniaralbina@uinsu.ac.id

kebangsaan suatu bangsa tidak akan mudah terpecah belah, saling mendukung dalam membangun dan menjaga bangsa yang lebih kuat sehingga tidak terprovokasi oleh opini public yang terbangun baik langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Semakin berkembangnya platform media sosial dan penggunaan gadget yang tidak mengenal batasan usia, waktu dan tempat. Hal ini berdampak pada semakin berkurangnya interaksi sosial dan kecenderungan menganggap apa yang ada di media sosial adalah sesuatu yang sudah benar. Dalam lingkungan madrasah tentu kondisi yang harus diwaspadai dan menjadi renungan agar peserta didik terhindar dari berita-berita hoaks. Karena Komitmen kebangsaan sebagai indikator dalam penguatan moderasi bergama, mengamalkan ajaran agama sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. (Yanti, 2023: 34)

Komitmen kebangsaan dalam berpegang teguh terhadap ideologi negara (Pancasila) dan dasar negara (UU) sangat dibutuhkan untuk mempertahankan keutuhan negara. Cara pandang, sikap, dan pola pikir dalam beragama sangat mempengaruhi komitmen seseorang dalam berbangsa dan bernegara. Karakter komitmen kebangsaan ini, sangat dibutuhkan untuk menggambarkan sejauh mana moderasi beragama dimiliki oleh seorang individu. Individu moderat, yang memiliki sikap moderasi beragama akan menjadikan agama dan ideologi serta dasar negara menjadi dasar dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Individu moderat, akan secara adil memposisikan agama dan bangsanya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari tanpa terlalu condong ke salah satunya. Hal ini sejalan dengan pendapat Lukman Hakim, dalam perspektif moderasi beragama, menjalankan kewajiban sebagai pemeluk agama sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. (Faridah, dkk, 2021: 44)

Pasang surutnya komitmen kebangsaan (nasionalisme) merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia era kini. Ketika orde baru runtuh dan mewariskan konflik komunalisme masyarakat berdasarkan etnis yang menyebabkan rasa sebagai orang Indonesia semakin berkurang, diskriminasi ditengarai sebagai salah satu penyebabnya konflik tersebut. Sehubungan dengan komitmen kebangsaan itu sendiri, bisa muncul secara berbeda-beda dari orang per-orang dengan komitmen kejuangannya masing-masing. Akan tetapi, komitmen kebangsaan bisa juga muncul dalam kelompok yang berpotensi luar biasa kekuatannya. Komitmen kebangsaan memiliki konsep yang dinamis adanya dalam mencapai cita-cita bangsa yang selanjutnya berkembang menjadi wawasan kebangsaan yakni, pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita 2 kehidupan bersama dan tujuan nasional yang jelas. (Suhaida, 2009: 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna komitmen kebangsaan

Komitmen memiliki arti tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. (Widayati, 2021: 242).

Menurut Anderson seperti yang dikutip oleh Poespowardoyo, arti kebangsaan tidak semata merujuk pada latar belakang sejarah, nasib bersama, suku, bahasa, kebudayaan, religi. Lebih dari itu, kebangsaan merupakan apa yang digambarkan oleh masyarakat tentang dirinya dan sesamanya dalam masyarakat. (Poespowardoyo, 2003: 6) Maksudnya ialah Poespowardoyo menekankan bahwa kebangsaan merupakan proses internalisasi yang membentuk jati diri suatu bangsa melalui simbol-simbol yang dibangun oleh komunitas dengan berlandaskan pada modal-modal dasar seperti latar belakang sejarah, nasib bersama, suku, bahasa, kebudayaan, religi.

Komitmen kebangsaan dapat dimaknai sebagai kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ekspresi kecintaan terhadap negeri tergantung pada wawasan kebangsaannya yaitu cara pandang ke dalam dan ke luar sebagai bangsa terhadap ideologi, ekonomi, sosial, budaya, agama, politik, dan Hankam (Mardawani, 2019: 144). Wawasan kebangsaan dipengaruhi kualitas rasa kebangsaan, yaitu “mentalitas kebangsaan” dan “intelektual kebangsaan” bersemangat menjaga nilai kebangsaan dan tegaknya republik (nasionalisme), dan munculnya inovasi penyelesaian masalah kebangsaan (patriotism). (Soeprapto, 2010: 27). Komitmen kebangsaan adalah bagaimana cara pandang, sikap seseorang. mengamalkan ajaran agama berarti melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dan itu adalah perwujudan dari pengamalan ajaran agama. (Kementerian Agama RI., 2019).

Komitmen kebangsaan merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya di dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Pada hakikatnya, Pancasila menjadi dasar bagi penciptaan relasi-relasi harmonis antaragama dan antarbudaya di Indonesia serta menjauhkan Indonesia dari sikap intoleransi terhadap suku, budaya, bahasa, etnis, agama dan adat istiadat. Pancasila juga mempunyai fungsi sebagai pemersatu, pengarah, motivator, pengontrol untuk menjadikan bangsa dan negara Indonesia sebagai bangsa dan negara yang adil dan makmur. Pancasila bahkan menjadikan warga Indonesia yang beragama dan berbudaya menjadi pribadi-pribadi yang ramah, toleran dan menghargai keragaman. (Asatoge, 2021: 22-23).

Membangun komitmen kebangsaan merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan oleh bangsa ini sebagai identitas dan jati diri bangsa dan negara Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, menjaga dan merawatnya merupakan komitmen bangsa dan negara Indonesia untuk melestarikan masa depan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beranekaragam ini.

Makna Pilar Pancasila

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila (sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum), Pancasila juga bersifat filosofis (Kaelan, 2012: 24). Pancasila mengandung nilai-nilai yang mesti dihayati dan dipedomani oleh seluruh warganegara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi komitmen masyarakat Indonesia untuk terus membela negara dan menjaga persatuan terhadap perbedaan suku dan agama sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia itu sendiri (Sari, 2020: 24).

Pilar pertama bagi tegak kokoh berdirinya negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai pilar bangsa Indonesia? Perlu diketahui ada beberapa alasan, yaitu:

- a. Pilar atau tiang penyangga suatu bangunan harus memenuhi syarat, yakni disamping kokoh dan kuat, juga harus sesuai dengan bangunan yang disangganya. Kalau bangunan tersebut sederhana tidak memerlukan tiang yang terlalu kuat, tetapi bila bangunan tersebut merupakan bangunan permanen, konkrit, yang menggunakan bahan-bahan yang berat, maka tiang penyangga harus disesuaikan dengan kondisi bangunan dimaksud.
- b. Pilar atau tiang penyangga suatu negara-bangsa, harus sesuai dengan kondisi negara-bangsa yang disangganya. Negara dan bangsa Indonesia adalah negara besar dengan cakupan wilayah cukup luas seluas daratan Eropa yang terdiri atas berpuluh negara, membentang dari barat ke timur dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan dari pulau Miangas sampai pulau Rote, meliputi ribuan kilometer. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17 000 pulau lebih, terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki beraneka adat dan budaya, serta memeluk berbagai agama dan keyakinan, maka *belief system* yang dijadikan pilar harus sesuai dengan kondisi negara bangsa tersebut.
- c. Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan memiliki wilayah yang sangat luas. Pancasila memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari *belief system* yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Negara Indonesia adalah negara hukum, yang bermakna bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan ditegakkan. Setiap kegiatan dalam negara harus berdasar pada hukum, dan setiap warganegara harus tunduk dan taat pada hukum. Pancasila sebagai cita hukum mengejawantah dalam dasar negara, yang dijadikan acuan dalam menyusun segala peraturan perundang-undangan.
- e. Pancasila merupakan common denominator bangsa, kesepakatan bangsa, terbukti sejak tahun 1945 Pancasila selalu dicantumkan sebagai dasar negara. Pancasila dipandang cocok dan mampu dijadikan landasan yang kokoh untuk berkiprahnya bangsa Indonesia dalam menegakkan hukum, dalam menjamin terwujudnya keadilan (Soeprapto, 2010: 6-7).

Pancasila dengan semua silanya yang lima itu adalah suatu kesatuan yang utuh, yang tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Pancasila pun haruslah

utuh, tanpa ada tekanan pada salah satu silanya secara tidak beralasan. Sebab, antara sila-sila dalam Pancasila tersebut ada kaitan yang sangat erat yang menjadi perekat bagi keutuhan nilai ideologisnya. Dikarenakan Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai dasar yang terkandung dalam lima sila itu sekaligus pula menjadi nilai-nilai dasar dalam berwawasan kebangsaan (Madjid, 1997: 239-246). Beberapa makna yang dimaksud dari lima sila tersebut ialah:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila dasar untuk sila-sila yang lain. Setidaknya, sila pertama ini menjadi dasar dan sumber: a) bagi kehidupan berkeimanan dan berketagwaan, sekaligus menjadi sumber adanya kesadaran tentang makna dan tujuan hidup; b) dalam pelepasan diri dari semua berntuk kepercayaan palsu, karena pada dasarnya manusia tidak mungkin hidup tanpa kepercayaan; dan c) menjadi dasar utama dan hakiki bagi kesadaran etis dan moral manusia.
2. Sila Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab harus dipandang sebagai kelanjutan langsung serta rangkaian kesatuan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan pertama dan utama kebahagiaan hidup manusia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan diikuti dengan budi pekerti luhur yang merupakan wujud wawasan dari perikemanusiaan. Nilai dasar yang hakiki dari sila kedua ini adalah bahwa manusia adalah makhluk kebaikan, yang senantiasa merindukan dan berusaha menemukan kebenaran dan kebaikan.
3. Sila Persatuan Indonesia menjadi nilai dasar dan piranti yang sangat esensial dan strategis. Persatuan memberi wadah bagi setiap usaha melaksanakan nilai-nilai luhur kehidupan manusia. Tanpa persatuan, nilai-nilai luhur itu tidak akan mudah diwujudkan. Nilai persatuan harus dipersepsikan dalam rangkaian kesatuan dengan motto nasional Bhinneka Tunggal Ika. Atas dasar kebhinnekaan itu ditegakkan persatuan yang dinamis.
4. Sila Kerakyatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang sering dipahami sebagai sila demokrasi. Sila ini merupakan nilai kelanjutan yang komprehensif dari sila-sila sebelumnya, yang ditunjukkan dengan kesediaan untuk mengakui kekuasaan rakyat dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Pengakuan ini dimulai dengan pengakuan adanya hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat, dan sebaliknya, pengakuan pada adanya kewajiban setiap orang untuk mendengar dan memperhatikan pendapat orang lain.
5. Sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini dipandang sebagai tujuan kehidupan kita bernegara dan bermasyarakat yang beriman dan bertaqwa (sila pertama), mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan (sila kedua), bersatu secara nasional (sila ketiga), dan mengakui kedaulatan atau kekuasaan rakyat dengan menerapkan mekanisme musyawarah/mufakat (sila keempat). Keadilan mengandung arti adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rakyat Indonesia. Keadilan ini akan terwujud jika keempat sila yang lainnya bisa dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan (Khaeruman dan Ghazali, 2020: 38-39).

Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Pilar Pancasila

Beberapa nilai-nilai dari sebagai berikut:

- a. Nilai dasar kebangsaan dalam sila pertama, diantaranya:
 - 1) Pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaannya.
 - 3) Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada pihak lain.
 - 4) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - 5) Saling hormat-menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan.
 - 6) Saling menghargai terhadap keyakinan yang dianut oleh pihak lain.
 - 7) Beribadat sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya, tanpa mengganggu kebebasan beribadat bagi pemeluk keyakinan lain.
 - 8) Dalam melaksanakan peribadatan tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban umum.
- b. Nilai dasar kebangsaan dalam sila kedua, diantaranya:
 - 1) mendudukan manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya.
 - 2) mengakui dan menghormati kebebasan manusia dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat.
 - 3) mengakui dan menghormati sifat pluralistik bangsa, bersikap toleran dan inklusif.
- c. Nilai dasar kebangsaan dalam sila ketiga, diantaranya:
 - 1) Bangga pada negara-bangsanya atas kondisi yang terdapat pada negara-bangsanya serta prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh warganegaranya.
 - 2) Cinta pada negara-bangsanya serta rela berkorban demi negara-bangsanya.

d. Nilai dasar kebangsaan dalam sila keempat, diantaranya:

- 1) Dalam mengambil keputusan bersama diutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Dalam mencari kesepakatan bersama tidak semata-mata berdasarkan pada suara terbanyak, tetapi harus berlandaskan pada tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap keputusan bersama harus mengandung substansi yang mengarah pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta terwujud dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Tidak menerapkan prinsip tirani minoritas dan hegemoni/dominasi mayoritas. Segala pemangku kepentingan atau stakeholders dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilibatkan dalam penetapan kebijakan bersama sesuai dengan peran, kedudukan dan fungsi masing-masing.
- 4) Mengacu pada prinsip demokrasi politik dan ekonomi, bahwa demokrasi harus mengantarkan rakyat Indonesia menuju keadilan dan kemakmuran.

e. Nilai dasar kebangsaan dalam sila kelima, diantaranya:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 5) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 6) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- 7) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 8) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Soeprapto, 2010: 20).

Makna komitmen kebangsaan

Komitmen memiliki arti tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. (Widayati, 2021: 242).

Menurut Anderson seperti yang dikutip Poespowardoyo, arti kebangsaan tidak semata merujuk pada latar belakang sejarah, nasib bersama, suku, bahasa, kebudayaan, religi. Lebih dari itu, kebangsaan merupakan apa yang digambarkan oleh masyarakat tentang dirinya dan sesamanya dalam masyarakat. (Poespowardoyo, 2003: 6) Maksudnya ialah Poespowardoyo menekankan bahwa kebangsaan merupakan proses internalisasi yang membentuk jati diri suatu bangsa melalui simbol-simbol yang dibangun oleh komunitas dengan berlandaskan pada modal-modal dasar seperti latar belakang sejarah, nasib bersama, suku, bahasa, kebudayaan, religi.

Komitmen kebangsaan dapat dimaknai sebagai kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ekspresi kecintaan terhadap negeri tergantung pada wawasan kebangsaannya yaitu cara pandang ke dalam dan ke luar sebagai bangsa terhadap ideologi, ekonomi, sosial, budaya, agama, politik, dan Hankam (Mardawani, 2019: 144). Wawasan kebangsaan dipengaruhi kualitas rasa kebangsaan, yaitu “mentalitas kebangsaan” dan “intelektual kebangsaan” bersemangat menjaga nilai kebangsaan dan tegaknya republik (nasionalisme), dan munculnya inovasi penyelesaian masalah kebangsaan (patriotism). (Soeprapto, 2010: 27). Komitmen kebangsaan adalah bagaimana cara pandang, sikap seseorang. mengamalkan ajaran agama berarti melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dan itu adalah perwujudan dari pengamalan ajaran agama. (Kementerian Agama RI., 2019).

Komitmen kebangsaan merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya di dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Pada hakikatnya, Pancasila menjadi dasar bagi penciptaan relasi-relasi harmonis antaragama dan antarbudaya di Indonesia serta menjauhkan Indonesia dari sikap intoleransi terhadap suku, budaya, bahasa, etnis, agama dan adat istiadat. Pancasila juga mempunyai fungsi sebagai pemersatu, pengarah, motivator, pengontrol untuk menjadikan bangsa dan negara Indonesia sebagai bangsa dan negara yang adil dan makmur. Pancasila bahkan menjadikan warga Indonesia yang beragama dan

berbudaya menjadi pribadi-pribadi yang ramah, toleran dan menghargai keragaman. (Asatoge, 2021: 22-23).

Membangun komitmen kebangsaan merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan oleh bangsa ini sebagai identitas dan jati diri bangsa dan negara Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, menjaga dan merawatnya merupakan komitmen bangsa dan negara Indonesia untuk melestarikan masa depan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beranekaragam ini.

SIMPULAN

Nilai-nilai yang terkandung dalam lima pilar Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—merupakan fondasi utama dalam membangun komitmen kebangsaan yang kokoh. Pilar-pilar ini tidak hanya menjadi pedoman etika dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan publik yang berkeadilan dan inklusif.

Sebagai ideologi bangsa, Pancasila berperan penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman, meneguhkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial, serta menghadapi tantangan globalisasi dan potensi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman, Indonesia dapat terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mencapai cita-cita bersama sebagai bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat.

REFERENSI

- Asatoge, S. d. (2021). Komitmen Kebangsaan Mahasiswa STP Reinha Melalui Ritual Keagamaan Dalam Spirit AYD 2017. *Jurnal Reinha*. Vol. 12. No. 2.
- Badri Khaeruman dan Muchtar Ghazali. (2020). 4 Pilar Wawasan Kebangsaan. Cet. 1. Bandung: LP2M UIN Bandung.
- Indonesia, K. P. (2021). Panduaan Integrasi Pancasila dalam Kurikulum. Jakarta: Kemendikbud.
- Madjid, Nurcholis. (1997). Tradisi Islam, Peran, dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia. Paramadina: Jakarta.
- Mardawani, L. V. (2019). Implementasi Nilai Luhur Pancasila Melalui Kegiatan Bakti Mahasiswa Untuk Memperkuat Komitmen Kebangsaan Pada Generasi Milenial. *Jurnal PEKAN*.
- M.S. Kaelan. (2012). *Problem Epistimologis Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma.
- Poespowardoyo, S. (2003). Dinamika dan Implikasi Etis Wawasan Kebangsaan dalam Menyongsong Hari Depan Indonesia. *Jurnal Ketahanan Indonesia*. Vol. 2. No. 1.
- Sari, Apri Atika. (2020). *Tesis: Implementasi Empat Pilar Kebangsaan Dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Darul 'Ulum*. Lampung: IAIN Metro.
- Soeprapto. (2010). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara.
- Sitti Faridah, dkk. (2023). Karakter Bangsa dan Bela Negara: Menumbuhkan Identitas Kebangsaan dan Komitmen Nasionalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 7. No. 2.
- Suhaida, D. (2009). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penguatan Komitmen Kebangsaan Pada Masyarakat Etnis Tionghoa Pontianak. *Jurnal Wahana Didaktika*. Vol. 1. No. 4.
- Widayati, M. S. (2021). Komitmen Bernegara Melalui Moderasi Hindu. *Jurnal Widya Aksara*. Vol. 26. No. 2.
- Yanti, Y. (2023). Moderasi Beragama di Madrasah: Studi Tentang Penguatan Komitmen Kebangsaan Pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang. *Edois: International Jurnal of Islamic Education*. Vol. 1. No. 1.